

ANALISIS RASIO LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2010 KOTA TANGERANG SELATAN

Udin Saefudin

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu Jakarta Selatan

email: udin_kalidasa@hotmail.com

Abstract

The research aims to know financial ratio District Government of Tangerang Selatan from the budget realization report, there are two financial ratios as analysis. Revenue analysis could count growth revenue and tax. To count financial ratio (district self-ratio, decentralization grade, effectiveness to revenue ratio, efficiency ratio to PAD. And expenditure analysis to know value for money (expenditure growth analysis, Operational expense to total expense, capital expenditure to total expenditure, and expenditure realization to total expenditure).

Kata Kunci: Rasio Keuangan, kemandirian, efektivitas, efesiensi

PENDAHULUAN

Amanat UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan dari diberikan kewenangan otonomi yang luas tersebut agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan menyejahterakan masyarakatnya secara adil, merata dan berkesinambungan. Tujuan ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki daerahnya, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara maksimal.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan pengelolaan keuangan yaitu UU. No. 17/2003

tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan dan UU. No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan PP. No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan wajib menyampaikan laporan keuangan daerah.

Tujuan utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan daerah juga dijadikan alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Salah satu pendekatan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan pendekatan analisis ratio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan bersama legislatif.

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari analisis neraca, analisis laporan realisasi anggaran dan analisis laporan arus kas. Laporan ini digunakan untuk (1) mengukur atau menilai sumber daya ekonomi

yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah apakah mempunyai manfaat ekonomi ataukah tidak; (2) menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; dan (3) mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) merupakan daerah otonomi baru yang lahir berdasarkan UU. No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten. Selama tiga tahun berdirinya, Kota Tangsel mampu menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi dan lain-lain yang sah. Menurut data yang ada, PAD Kota Tangsel terus meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan 2010. Masing-masing sebesar Rp. 22.391.525.425,- dan Rp. 110.366.185.00,-.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan nilai kemandirian keuangan Pemkot Tangsel dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Tiga tujuan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengkaji kemandirian keuangan daerah Kota Tangsel dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah;
3. Mengkaji tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja yang dilakukan selama periode 2009-2010

TINJAUAN TEORITIK

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan cara untuk mencari tahu gejala-gejala keuangan berdasarkan informasi keuangan yang tersedia dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Munawir (2002) menyatakan tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Analisis dilakukan dengan

mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur, menganalisis dan menginterpretasikan sehingga informasi lebih dapat dimengerti.

Bagi jenis organisasi usaha yang bersifat komersial/*private sector*, metode untuk analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan yang digunakan umum terdiri dari:

- a. Ratio Likuiditas yaitu ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu tahun).
- b. Rasio Profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
- c. Rasio *Leverage* yaitu rasio untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana dari pinjaman.
- d. Rasio Aktivitas yaitu rasio untuk mengukur efektifitas tidaknya perusahaan dalam mengendalikan sumber yang dimiliki.

Rasio-rasio tersebut dibuat untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu:

- a. Pemegang Saham yaitu untuk menganalisis dan menilai sampai sejauhmana tingkat pengembalian investasi dan kemampuan membayar dividen atau memperoleh laba.
- b. Kreditor/investor yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. *Vendor* yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek.
- d. Manajemen untuk menilai kinerja keuangan dalam periode akuntansi.

2. Teori Rasio Keuangan Daerah

Penggunaan analisis rasio keuangan juga dipergunakan pada pemerintah daerah dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan keuangan terjadi. Ada beberapa rasio keuangan daerah yang

dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan informasi keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, *debt service coverage ratio*, dan rasio aktivitas.

Rasio keuangan daerah dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Pemerintah daerah sebagai landasan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari pemilik daerah yaitu masyarakat.
- c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Kreditor dan investor untuk melihat peluang investasi.

Untuk memahami rasio laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik, terlebih dahulu harus mengetahui elemen laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan jenis-jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

- d. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan realisasi anggaran (LRA) yang disajikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah. LRA dijadikan untuk penilaian pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Berdasarkan LRA, pengguna laporan keuangan dapat menganalisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis pendapatan untuk melihat pertumbuhan pendapatan yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

- a. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2010} = \frac{\text{Pendapatan Tahun 2010} - \text{Pendapatan Tahun 2009}}{\text{Pendapatan Tahun 2009}} \times 100\%$$

- b. Rasio desentralisasi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

- c. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

d. Rasio kemandirian

Sementara, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi dan pembiayaan. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan dari luar. Semakin tinggi angka rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan atau sumber keuangan eksternal (bantuan pemerintah pusat dan provinsi) menunjukkan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Prov dan Pinjaman}}$$

e. Rasio efektifitas dan efisiensi PAD

Sementara rasio efektifitas dan efisiensi PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan ditargetkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100 persen. Rasio ini dirumuskan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efisiensi belumlah cukup. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

f. Debt service coverage ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah juga dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman atau dari sumber pembiayaan. DCSR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah merencanakan untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinj} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

g. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas meliputi analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja. Analisis keserasian belanja antara lain:

- 1) Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja
- 2) Analisis belanja operasi terhadap total belanja
- 3) Analisis belanja modal terhadap total belanja
- 4) Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini bersifat rutin dan jangka pendek. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

h. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisa belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- i. Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost and budgetary control*). Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal.

Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja langsung dan tidak langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Dalam sektor bisnis jenis belanja ini dikenal sebagai biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor publik, belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/expenditure*). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Sementara itu belanja tidak langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat (*hard budget*) dan efisiensi anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung Thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- j. Rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

- k. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, Unit Kerja A lebih

efisien dibandingkan Unit Kerja B. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

1. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Thd PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

HASIL PENELITIAN

1. Pertumbuhan Pendapatan Pemkot Tangsel ditahun 2010 yaitu Rp. 918.197.436.176 - Rp. 191.794.414.475/Rp. 191.794.414.475 x 100% = 378.6 %. Pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2010 sangat positif meningkat tajam dari tahun 2009.
2. Derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi anggaran tahun 2010 pemerintah Kota Tangerang Selatan 0,143 atau 14,3 % kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 1. Laporan Realisasi Pendapatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2009 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

No	Pendapatan	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah	22.391.525.-	131.503.971.-
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat		294.675.126.-

3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		290.170.-
4	Bantuan DAU/DAK		240.799.082.-
5	Bagi Hasil Pajak Provinsi		177.755.235.-
6	Hibah	35.071.000.000	39.399.965.-

Sumber data: DPPKAD Kota Tangsel 2009 - 2010

3. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan anggaran tahun 2010 Pemkot Tangsel sebesar 0.814 atau 81,4% menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung dari pemerintah pusat dan propinsi

4. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian tahun anggaran 2009 = 63,8%

Rasio kemandirian tahun anggaran 2010 = 18,4%

Dari perhitungan rasio kemandiriana keuangan daerah tahun anggaran 2010 terlihat bahwa tingkat kemandirian Pemkot Tangsel dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih bercukup baik dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin meningkat .

5. Rasio efektifitas dan efisiensi PAD

Tabel 2. Laporan Realisasi Pendapatan 2010 (dalam ribuan rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	110.356.185.000	131.503.971.623
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat	217.141.006.620	294.675.126.138
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	342.427.491	290.170.795
4	Bantuan DAU/DAK	240.799.082.200	240.799.082.200

5	Bagi Hasil Pajak Provinsi	152.891.371.163	177.755.235.326
6	Hibah	39.733.035.000	39.399.965.000

Sumber data: DPPKAD Kota Tangerang Selatan 2010

6. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas tahun anggaran 2010 Pemkot Tangsek sebesar 119,15%. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Sementara rasio belanja operasi terhadap total belanja untuk anggaran tahun 2010 sebesar 0.749 atau total belanja operasi sebesar 74.9 % ari total belanja.

Tabel 3. Laporan Realisasi Belanja Tahun 2010 (dalam ribuan rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	636.239.232	544.624.956
2	Belanja Modal	182.333.814	173.955.972
3	Belanja Transfer	10.600.000	8.670.700
4	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	0
	Total Belanja	830.239.232	727.251.629

Sumber data : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

7. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja tahun anggaran 2010 sebesar 0.239 atau APBD digunakan untuk belanja modal sebesar 23,9%.

8. Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Rasio belanja langsung terhadap total belanja tahun anggaran 2010 sebesar 0.667 atau penggunaan belanja langsung sebesar 66,7% dari total belanja.

9. Analisis belanja tidak langsung

Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja tahun anggaran 2010 sebesar 0.321 atau penggunaan belanja tidak langsung sebesar 32.1 % dari total belanja.

10. Rasio efisiensi belanja

Rasio efesiensi belanja tahun 2010 sebesar 87,60%.

11. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

PDRB Pemkot Tangsel sebesar 4.402.165. Rasio belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto tahun 2010 sebesar 165,2.

KESIMPULAN

Berdasarkan LRA Pemkot Tangsel tahun anggaran 2010 secara umum kinerja pendapatan daerah dapat dinyatakan baik, dilihat dengan terlampauinya target pendapatan sebesar 115,43%. Penerimaan PAD juga melebihi target anggaran sebesar 119,15% . Akan tetapi jika dilihat dari rasio desentralisasi, rasio ketergantungan dan kemandirian masih sangat tergantung dari pemeirintah pusat dan propinsi. PAD memberikan kontribusi sebesar 14,3% dari total penerimaan daerah. Ketergantungan pada pemerinath pusat dan propinsi sebesar 81,4%.

Kinerja anggaran belanja daerah Kota Tangsel dapat dinyatakan baik karena realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan sebesar 74,9%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja efisiensi belanja sebesar 25,1%. Akan tetapi efisiensi dapat diartikan sebagai rendahnya penyerapan anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A., 2002, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta

Mahmudi, 2006, *Analisis Alporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Munawir, 2002, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Empat, Liberty, Yogyakarta